

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP*, Vol. 2, No. 1, hlm. 49-62, P-ISSNL 2541-1691.
- BPKP. (2010). Perka BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- Defitri, S. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, Vol.12, No.1.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greenwood, R., & Suddaby, R. (2006). Institutional entrepreneurship in mature fields: the big five accounting firms. *The Academy of Management Journal*, 49(1), 27–48.
- Harnoni, H., Tanjung, A., & darlis, E. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Kepulauan Anambas). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1079–1093.
- Inapty, M. A. F. B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), hlm.27–42. P-ISSN: 1979-858X, E-ISSN: 2461-1190.
- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), hlm.337–348.
- Irwansyah & Wulandari, T. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Penata Laporan Keuangan dan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu*. Vol. 8, No. 3, hlm. 122 – 133, ISSN: 2303-0356.
- Kieso, D. E., Weygandt J. J., & Warfield T. D. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Kisworo, J., & Shauki, E. R. (2019). Teori Institusional Dalam Penyusunan dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Kasus pada Kementerian dan Negara di Indonesia). *Indonesian Treasury Reviu: Jurnal*

Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 4, 305–321.

Lestari, S. F., & Hastuti. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Prosiding 11th Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)*, 11(1), 820–827.

Nasution, L. M. (2017). Statistik Deskriptif. *Jurnal Hikmah*, Vol. 14, No. 1, ISSN: 1829 – 8419.

Nazaruddin & Syahrial. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 1, hlm, 105 – 120.

Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *Jurnal ComTech*, Vol. 5, No. 2, hlm. 1110-1118.

Powell, W. W., & DiMaggio, P. J. (1991). The new institutionalism in organizational analysis. *Chicago, USA: The University of Chicago Press*.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu PIPK Pemerintah Pusat.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern.

Triono, BRM. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), hlm. 213-220.

Sumber dari web:

<https://kkp.go.id/itjen/artikel/16714-pemantauan-pengelolaan-keuangan-dan-bmn-dalam-rangka-implementasi-pengendalian-intern-pelaporan-keuangan-pipk-kkp>

<https://dephub.go.id/post/read/kemenhub-telah-laksanakan-pengendalian-intern-atas-pelaporan-keuangan-secara-efektif?language=id>